



M. Pagi : "Penting dan Strategis Berkenaan Penggunaan Anggaran"

MEMPAWAH--Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi berkesempatan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Daerah Kalbar Tahun 2022, Selasa (17/5) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalbar itu mengusung tema Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan dan Implementasi P3DN Sektor Ketahanan Pangan di Kalbar.

"Kegiatan ini sangat penting dan strategis berkenaan dengan penggunaan anggaran atau keuangan dan proses pembangunan di daerah," pendapat Muhammad Pagi.

Karenanya, Wabup menyambut baik diselenggarakannya Rakorwasin keuangan dan pembangunan daerah di Kalbar sehingga dapat memberikan pemahaman bagi seluruh daerah untuk melakukan penyerapan anggaran dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang ada.

"Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah akan mendapatkan arahan dan petunjuk berkenaan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Supaya, penyerapan anggaran lebih maksimal dan tepat sasaran," ujarnya.

kan pengawasan dan mengkoordinir APIP kementerian/lembaga maupun pemda dalam pelaksanaan pengawasan percepatan P3DN.

"Sesuai dengan arahan Presiden RI yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam



FOTO IST

RAKORWASIN : Wabup saat menghadiri Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan Daerah di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar di Pontianak

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menghendaki seluruh pemerintah daerah di Kalbar dapat memperhatikan dan memahami penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang P3DN dan Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran agar dapat diimplementasikan dengan baik.

"Saya harap bisa dilakukan dengan inovasi-inovasi dan lain sebagainya sehingga anggaran untuk menggunakan lokal ini bisa diatas 70% bahkan lebih, saya yakin bisa," tegasnya.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, Gubernur menyebut daerah-daerah Provinsi Kalimantan Barat secara umum sudah ter-

masuk dalam kategori tahan. Dan kedepannya, Sutarmidji berharap akan terjadi peningkatan kategori ketahanan pangan menjadi sangat tahan.

"Dengan peningkatan kualitas bibit, pupuk, irigasi dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin Kalbar akan menjadi penyuplai pangan untuk wilayah-wilayah sekitarnya terutama IKN nantinya yang membutuhkan banyak sekali pangan," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Iwan Taufiq Purwanto mengatakan Rakorwasin yang digelar merupakan upaya BPKP melaku-

rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," ujarnya.

Iwan menjelaskan, poin-poin arahan Presiden RI yang tertera di Inpres tersebut diantaranya alokasi minimal 40% untuk pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri, dari target belanja minimal 400 triliun untuk kementerian atau lembaga.

"APBD 2022 bisa digunakan untuk produk dalam negeri, membentuk tim P3DN baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah, dibentuknya e-katalog sektoral maupun lokal termasuk di pemerintah daerah dan pencantuman di dalam kontrak kerjasama untuk kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan kemudahan persyaratan yang dibutuhkan," bebernya. (wah)